

BAB II

DINAMIKA PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA

2.1 Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sejak lama dari zaman Negara Republik Indonesia masih terdiri dari berbagai kerajaan yang tersebar di berbagai daerah hingga saat ini. Eksistensi perempuan berpolitik dalam masa kerajaan terlihat dari adanya prasasti atau peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran atau kedudukan yang setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jabatan publik dari jabatan terendah pada birokrasi pedesaan hingga birokrasi tertinggi pada ibukota kerajaan sebagai penguasa kerajaan (Nastiti, 2009). Namun, peran dan kedudukan penting perempuan dalam masa kerajaan ini tidak membuat perempuan begitu saja terlepas dari konstruksi budaya patriarki karena dominasi laki-laki yang menguasai struktur dan sistem sosial masyarakat selama berabad-abad.

Budaya patriarki membuat perempuan meyakini atau diyakini hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam ranah privat dan domestik saja yang membuat perempuan melakukan resistensi dan pergerakan untuk mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan berpolitik. Salah satu pergerakan perempuan yang memiliki popularitas dalam bidang politik yaitu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Gerwani merupakan organisasi perempuan yang berfokus pada program mempertahankan hak perempuan dan anak (Printina, 2019). Gerwani dianggap sebagai organisasi perempuan paling aktif dan progresif dalam kegiatan politik di Indonesia karena seringkali mengadakan aksi

kampanye dan demonstrasi untuk menyuarakan hak perempuan sejak masa kemerdekaan. Selain itu, Gerwani juga terlibat dalam pemilihan umum tahun 1955 dengan mengikuti kegiatan kampanye mendukung para calon dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterlibatan Gerwani dengan PKI membuat Gerwani dianggap terlibat dalam peristiwa pembunuhan para jendral G30S/PKI di Lubang Buaya yang membuat Gerwani dibubarkan pada 12 Maret 1966 bersamaan dengan tumbangnya PKI (Wirahman & Alfiani, 2022). Ditetapkannya Gerwani sebagai pihak yang terlibat dalam peristiwa G-30S PKI membuat perempuan Gerwani ditangkap dan menjadi sasaran penyiksaan dan kekerasan seksual di tangan militer Indonesia (Pohlman, 2015).



Gambar 2.1 Infografis Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen pada tahun 2024

Berakhirnya organisasi Gerwani membuat organisasi perempuan di Indonesia mulai tidak lagi aktif dalam kegiatan politik karena pemerintahan Orde Baru yang mulai berkuasa membatasi dan mengatur gerak organisasi perempuan, terlebih dalam kegiatan politik. Pada masa Orde Baru ini terdapat penurunan keterwakilan perempuan dalam parlemen dari tahun 1992 hingga 1999 berdasarkan data keterwakilan perempuan dalam parlemen dari Badan Pusat Statistika dan

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Indonesia Baik dari keterwakilan perempuan dalam parlemen sebanyak 12,4% dengan jumlah 62 orang perempuan dari 500 anggota parlemen di Indonesia menjadi 8,8% dengan jumlah 44 orang perempuan dari 500 anggota parlemen.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1968 hingga 1998, keterwakilan perempuan dalam bidang politik tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting. Pemerintahan Orde Baru mempertahankan kekuasaan dan wewenang absolut dalam sistem kekuasaan negara yang patrimonial. Rezim Orde Baru menjadikan Model patrimonial dalam keluarga sebagai kekuatan politik dengan menjadikan azas keluarga sebagai kontrol sosial dalam kehidupan sosial masyarakat (Ahlstrand,2022: 19). Selain berfungsi sebagai kekuatan dalam pemerintahan, metafora keluarga juga memperkuat hubungan kekuasaan hierarkis antara laki-laki dan perempuan di mana bapak diposisikan sebagai sumber kekuasaan pertama dan ibu sebagai media kekuasaan. Nilan (dalam Ahlstrand 2022) memperlihatkan figur bapak memiliki wewenang atas perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang memiliki kelas subordinat karena Tuhan memberikan kuasa atas kebijaksanaan, serta kemampuan penguasaan diri dan emosi kepada figur bapak. Sementara itu, perempuan sebagai figur ibu diharapkan untuk tunduk kepada bapak dalam proses pengambilan keputusan dan tetap berada di ranah domestik. Pemerintah Orde baru juga menggunakan istilah Kodrat Wanita dalam wacana negara untuk menunjukkan bahwa perempuan secara takdir Tuhan telah diarahkan pada peran biologis sebagai seorang istri dan ibu (Blackburn,2004). Hal ini kemudian menutup akses perempuan untuk menjalankan peran dalam ranah publik.

Pemerintahan Orde Baru yang mengikat norma gender pada negara membuat perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan politik dianggap sebagai kekuatan yang merusak dan mengancam sistem negara. Wieringa (dalam Ahlstrand, 2022) Mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru kepada Gerwani yang menjadi titik balik penarikan perempuan dari kehidupan politik, perempuan yang aktif dalam kegiatan politik dicap sebagai komunis baru. Adapun perempuan yang berhasil memperoleh posisi dalam partai politik pada masa pemerintahan Orde Baru umumnya diperoleh melalui politik dinasti atau popularitas dengan melayani kepentingan elit kekuasaan.

Menurut Bessel (dalam Ahlstrand, 2022) pemerintahan Orde Baru telah menghambat pencapaian kesetaraan gender pada bidang politik karena norma-norma patriarki menjadi terus bereproduksi dalam kegiatan politik sehingga perempuan yang berhasil mendapatkan posisi dalam bidang politik di Indonesia mendapatkan perhatian publik dan media yang signifikan daripada laki-laki dalam menempuh jalur kekuasaan. Sebagian perempuan pada masa Orde Baru menempuh jalur kekuasaan menggunakan ikatan keluarga dinasti untuk memberikan dukungan secara legitimasi dan finansial, sedangkan beberapa perempuan lainnya memanfaatkan koneksi sosial, komersial, agama, dan kejuruan yang dimilikinya (Choi, 2019).



Gambar 2. 2 Penggunaan Stereotip Negatif Perempuan dalam Kampanye

Reproduksi budaya patriarki yang menghambat kesetaraan gender dalam bidang politik membuat ketidaktercapaian keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Selain itu, tidak tercapainya keterwakilan perempuan dalam politik dikarenakan adanya pandangan bahwa politik merupakan dunia laki-laki, perempuan dianggap tidak perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan hanya sebagai pelengkap dalam politik, serta adanya hukum di bidang politik yang masih mendiskriminasi perempuan (Antari, 2023). Tjokroaminoto (dalam Habibah, 2015) juga menyebutkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam ruang politik diakibatkan oleh posisi subordinat perempuan yang dilanggengkan secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi agama, kesulitan akses informasi yang mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan tawaran untuk merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan, adanya doktrin citra perempuan yang dipaksakan pada Orde Baru, serta kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian, stereotip perempuan dalam politik juga menjadi faktor kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik karena perempuan dianggap

kurang memiliki jiwa kepemimpinan, kompetensi, dan sifat maskulin yang diperlukan dalam kegiatan politik (Schneider & Bos, 2014)

Permasalahan dan hambatan ketercapaian keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dimulai dari pemerintahan Soekarno dengan pengesahan Undang-Undang (UU) No.68 tahun 1958 mengenai ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang berisikan kebijakan pemenuhan hak suara perempuan, hak perempuan untuk dipilih, dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan dan tugas dalam pemilihan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian, pengesahan UU No.7 tahun 1984 yang berisikan ratifikasi dari konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yang berisikan hak dan jaminan bagi perempuan untuk dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dalam kegiatan politik setelah pergantian pemerintahan dari rezim Orde Baru menjadi Orde Reformasi, kebijakan afirmasi untuk mencapai kesetaraan perempuan dalam bidang politik kemudian mulai diberlakukan melalui UU No.12 Tahun 2003 mengenai Pemilu DPR, DPD, dan DPRD di mana partai politik memiliki kewajiban untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen yang kemudian disempurnakan dalam UU No.22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur jumlah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) minimal 30 persen, UU No.2 Tahun 2008 pasal 2 yang

mengatur syarat pendirian Partai Politik dengan menyertakan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, serta UU No.2 Tahun 2008 Pasal 20 yang mengatur kepengurusan partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen. Selain itu, pemerintah juga menetapkan aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang berisikan kewajiban partai politik dalam mengalokasikan 60% dana yang diterima dari negara untuk pendidikan politik perempuan.

Data & Tren Partisipasi					
Kriteria	2015	2017	2018	2020	2024
Jumlah Daerah Pemilihan	264 daerah	101 daerah	171 daerah	270 daerah	545 daerah
Jumlah Peserta Cakada/Cawakada	1.646 calon	614 calon	1.140 calon	1.549 calon	1.551 calon
Jumlah Perempuan Peserta (Cakada/Cawakada)	124 perempuan (7,47 persen)	44 perempuan (7,17 persen)	101 perempuan (8,2 %)	161 perempuan (11 %)	309 perempuan (19,92%)
Jumlah Perempuan Calon Gubernur	1 perempuan	1 perempuan	2 perempuan	2 perempuan	7 perempuan
Jumlah Perempuan Calon Wakil Gubernur	0	3 perempuan	5 perempuan	3 perempuan	11 perempuan
Jumlah Perempuan yang Terpilih	46 perempuan (37,1%)	15 perempuan (34%)	14 perempuan (13,86%)	57 perempuan (35,4%)	-
Rincian Perempuan yang Terpilih	0	1 Wakil Gubernur 8 Bupati 3 Wakil Bupati 2 Walikota 1 Wakil Walikota	1 Gubernur 3 Walikota 10 Bupati	1 Wakil Gubernur 27 Bupati 23 Wakil Bupati 1 Walikota 5 Wakil Walikota	

Gambar 2. 3 Data Partisipasi Perempuan dalam Pilkada

Dengan adanya kebijakan dan beragam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, partisipasi politik perempuan terus mengalami kenaikan hingga saat ini. Berdasarkan data KemenPPA yang divisualisasikan dalam infografis Kompaspedia calon kepala daerah perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,92 persen dari tahun 2020 yang awalnya hanya sebesar 11 persen dengan jumlah 161 perempuan dari 1.549 calon kepala daerah yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkat menjadi 19,92 persen dengan jumlah 309 perempuan dari 1.551 calon kepala daerah yang terlibat dalam Pilkada 2024.

Peningkatan jumlah perempuan memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya kepemimpinan perempuan karena perempuan sebagai pemimpin dalam pemerintahan dianggap memiliki kemampuan persuasif untuk mencapai tujuannya, dapat menerima dan memperbaiki kritik, memiliki semangat tim, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta berani mengambil resiko. (Nurrohman, et al., 2021). Keterbukaan masyarakat dengan adanya kepemimpinan perempuan ini dapat dilihat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur di Pilkada 2024 yang berisikan tiga kandidat perempuan calon Gubernur Jawa Timur yaitu Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini.

Phillips (dalam Dementieva, 2024) dengan teori kehadiran politiknya menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya perihal jumlah dan kehadiran fisik, namun juga melibatkan pengakuan atas kepentingan, pengalaman, dan perspektif dari perempuan itu sendiri dalam politik sehingga terwujud lingkungan politik yang inklusif dan agenda politik dengan berfokus pada kebijakan yang responsif terhadap isu kesetaraan gender. Dengan latar belakang aktivis perempuan dan rekam jejak pengalaman politik yang beragam, ketiga calon Gubernur Jawa Timur dalam hal ini membuat kontestasi politik berfokus pada isu perempuan, sosial, dan inklusivitas yang jarang ditampilkan calon pemimpin laki-laki. Luluk Nur Hamidah yang dikenal sebagai aktivis yang peduli dengan nasib perempuan berfokus pada isu perempuan dan kelompok marginal, Khofifah Indar Parawansa yang dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan kompeten berfokus ke isu kesejahteraan dan lumbung pangan, sedangkan Tri Rismaharini yang dikenal

sebagai pemimpin yang tegas berfokus pada isu kesejahteraan dan transparansi birokrasi (Luviana,2024).

Ketiga calon kepala daerah dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024 ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki cara dan karakter kepemimpinan yang berbeda, namun mereka tetap membawa isu mengenai perempuan dan kesetaraan gender sebagai isu utama. Mereka menunjukkan optimisme bahwa perempuan memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam menduduki jabatan tertentu, ikut terlibat membentuk kebijakan publik, serta memiliki kemampuan untuk ikut bersaing dalam kontestasi politik sebagai pemimpin yang kompeten (Luviana,2024).

2.2 Perempuan Berpolitik dalam Sinema Indonesia

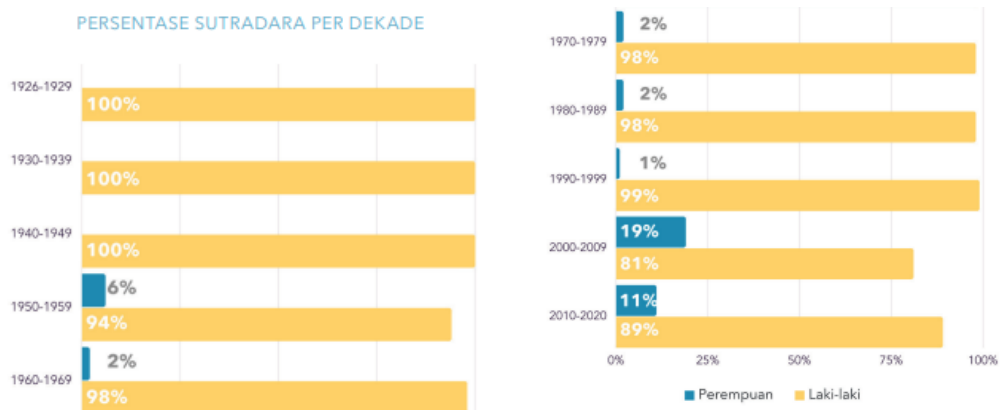
Penggambaran perempuan dalam industri sinema di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosial politik yang tengah berlangsung dalam masyarakat dan keterwakilan perempuan dalam media itu sendiri. Perempuan yang sebelumnya digambarkan dalam industri sinema dengan stereotip negatif menjadi sosok yang mandiri dan berdikari. Pada masa penjajahan, perempuan dalam industri sinema digambarkan melalui peran adegan kekerasan, kejahatan, dan seksual karena produksi sinema yang dikuasai oleh bangsa Eropa dan Cina tidak memberikan kontrol pada para pemain atas kegiatan produksi. Kemudian, pada masa Orde Lama yang menjunjung tinggi budaya populer dengan kearifan lokal, industri sinema menggambarkan perempuan sebagai sosok yang pasif dan lemah, berbeda dengan laki-laki yang digambarkan superior dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan (Wahyuni & Adnan, 2022),

Industri sinema kemudian memburuk pada masa Orde Baru karena kontrol yang ketat oleh pemerintahan Orde Baru terhadap media massa yang menjadikan film digunakan sebagai propaganda untuk melanggengkan praktik maskulinitas laki-laki dan figur *ibuisme* pada perempuan sehingga perempuan dipandang dengan fungsi domestik dan reproduksinya saja, ditambah adanya krisis ekonomi membuat perempuan dalam industri sinema dijadikan sebagai objek erotisme dan seksual karena dapat menarik banyak minat penonton dengan biaya produksi yang rendah (Wahyuni & Adnan, 2022).

Peran subordinasi dan objektifikasi tubuh perempuan karena dominasi laki-laki dengan sudut pandang patriarki dalam industri sinema dan propaganda Orde Baru membuat keterwakilan perempuan dalam industri sinema tidak diperhatikan. Sejak produksi film pertama di Indonesia pada tahun 1926 hingga tahun 1998, perempuan hanya memiliki peran sebagai pemain film yang mengikuti arahan sutradara yang didominasi oleh laki-laki. Adapun sutradara perempuan yang berhasil membuat film layar lebar pada kurun waktu tersebut hanya berjumlah empat sutradara dengan genre yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan hasil produksi film laki-laki (Hanan, 2021).

Kebebasan para sineas perempuan untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya dapat dirasakan setelah akhir masa pemerintahan Orde Baru setelah sebelumnya dibatasi oleh kontrol Pemerintah Orde Baru. Para sutradara perempuan mulai hadir meningkatkan keterwakilan perempuan dalam industri sinema dengan memberikan perspektif baru untuk menggeser penggambaran perempuan dari tema seksualitas menjadi tema kemandirian, seperti sutradara Nan Triveni Anchas

dengan merilis film *Pasir Berbisik* pada tahun 2001 yang berisikan resistensi perempuan terhadap masyarakat patriarkis dan perjuangan hak-hak perempuan dalam masyarakat era 1960an. Tidak hanya sutradara perempuan, peran lain perempuan dalam industri sinema pada masa setelah Orde Baru juga terus meningkat menambah keterwakilan perempuan dalam industri sinema sebagai produser, penulis skenario, editor, desainer, dan berbagai peran lainnya (Wahyuni & Adnan, 2022).



Gambar 2.4 Data Persentase Sutradara per Dekade Tahun 2020

Peran dan keterwakilan perempuan dalam industri sinema di Indonesia terus meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan platform digital sebagai penyedia akses layanan *streaming* film atau yang biasa disebut dengan Over the Top (OTT), seperti platform WeTV, Netflix, Hulu, Disney+, dan Iflix memungkinkan film produksi perempuan maupun film yang menunjukkan adanya keterwakilan perempuan dapat diakses dan menjangkau banyak peminat dengan distribusi yang cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Platform OTT terbukti dapat menjangkau banyak peminat produk film, khususnya di Indonesia karena berdasarkan data The Trade Desk pada tahun 2023 sebanyak

satu dari tiga orang Indonesia mengakses platform OTT dengan mengonsumsi konten sebesar 3,5 miliar jam setiap bulan (Mamduh, 2023). Keterjangkauan dan kelebihan *platform* OTT dalam mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam industri sinema mampu menghadirkan representasi yang adil mengenai perempuan dengan menampilkan perempuan sebagai sosok yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan politik yang dianggap sebagai ranah maskulin.

WeTV sebagai salah satu platform digital *streaming* film yang memiliki banyak penggemar dengan total unduhan lebih dari 100 juta kali dan menempati urutan kelima sebagai aplikasi hiburan terpopuler dalam aplikasi Google Play Store telah menghadirkan berbagai film yang mengangkat dan merepresentasikan isu perempuan berpolitik melalui format *web series*, seperti *Tilik the Series* (2023) dan *Rekaman Terlarang* (2024). *Web series* sendiri merupakan program acara serial yang ditayangkan pada sebuah media yang biasanya dirancang khusus untuk dirilis melalui internet (Alfajri et al., 2015).

Tabel 2. 1 Perbedaan Film dengan Format Web Series dan Program TV

ASPEK	WEB SERIES	PROGRAM TV
Distribusi	Pendistribusian dengan jaringan internet berskala internasional	Distribusi seringkali berskala nasional
Keterlibatan Penonton	Interaktif	Kurang interaktif
Storytelling	<i>Web Series</i> memiliki keleluasaan dalam mengembangkan materi dan jumlah episodenya.	Muatan dan gaya <i>Storytelling</i> program TV diatur oleh Undang-undang yang berlaku
Pendanaan	<i>Web Series</i> memiliki peluang pendanaan yang besar dari pihak ketiga.	Program televisi dibiayai melalui iklan, biaya lisensi, pendanaan pemerintah, dan

		usaha lain yang sah terkait penyiaran.
Aturan	<i>Web Series</i> memiliki otoritas dalam hal berkreasi	Program televisi di Indonesia diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

(Sumber: Alfajri et al., 2015 dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran)

Tilik the Series (2022) merupakan *web series* yang menceritakan mengenai kisah Bu Tejo yang hendak mengikuti kontestasi politik dari yang awalnya menjadi tim sukses kemudian mencalonkan diri menjadi lurah. Hasanah (dalam Yani, 2018) menggambarkan sosok pemimpin perempuan sebagai karakter yang serba bisa, serba tahu, serta pengendali dan pengambil keputusan. Namun, pemimpin perempuan digambarkan membutuhkan laki-laki dan tidak memiliki kuasa terhadap laki-laki. Dalam hal ini, Bu Tejo sebagai tokoh utama yang terlibat dalam kegiatan politik digambarkan sebagai sosok yang pemberani, kuat dan tegas, serta peduli terhadap isu pemberdayaan perempuan. Namun, Bu Tejo tetap merasakan perlunya sosok suami sebagai laki-laki yang mendukungnya untuk menjadi pemimpin. Meskipun banyak pihak perempuan yang terlibat dalam kegiatan produksi film ini, namun penggambaran sosok perempuan masih tidak jauh dari stereotip negatif perempuan sebagai sosok yang suka bergosip dan emosional.



Gambar 2.5 Poster film Rekaman Terlarang (Sumber: Instagram @wetvindonesia)

Rekaman Terlarang (2024) dengan sutradara Dinna Jasanti menggambarkan perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik dengan berbagai tokoh dan karakter

yang berbeda-beda. Rena sebagai tokoh utama perempuan digambarkan sebagai alat transaksi politik melalui pernikahan untuk melanggengkan kekuasaan para laki-laki yang berambisi dengan karakter kuat. Linda sebagai istri dari seorang politikus digambarkan sebagai sosok yang lemah dan kompleks karena mengalami konflik peran antara menjadi seorang istri atau mengikuti keinginan sang anak (Satya, 2024). Kemudian, Rininta sebagai politisi perempuan digambarkan sebagai sosok yang kuat, berani, memegang amanah, serta berani mengaku dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang dilakukan (Marvela, 2024).

Penggambaran perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik dengan karakter yang berbeda-beda dikarenakan berdasarkan Frankel (dalam Zalsabila, 2019), pemimpin perempuan akan menghadapi berbagai reaksi yang datang baik dari laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengakibatkan kepemimpinan perempuan yang berhubungan dengan bidang politik mendapatkan reaksi yang berbeda atau bisa saja sama dari laki-laki maupun perempuan dengan dua sudut pandang yang berlawanan dalam bidang film sehingga sutradara perempuan pun juga dalam menggambarkan kepemimpinan perempuan tidak selalu dengan perspektif positif.

2.3 Tilik the Series

Film Tilik the Series (2023) merupakan *web series* dengan drama komedi yang diproduksi oleh Ravacana Films dan MD Entertainment dengan sutradara Wahyu Agung Prasetyo yang tayang perdana pada 31 Maret 2023 di *platform streaming* film WeTv dan Iflix yang dapat menjangkau berbagai negara di Asia. Dengan produser Elena Rosmeisara, Film Tilik the Series mengembangkan cerita

dari film pendek Tilik yang *viral* pada tahun 2018 yang membahas mengenai budaya menjenguk orang sakit dan *stereotip* karakter perempuan di perdesaan menjadi berfokus pada perspektif pemberdayaan perempuan dalam bidang politik melalui tokoh-tokoh dalam Film Tilik the Series yang terdiri dari delapan episode dengan durasi 30 hingga 40 menit. Perspektif tersebut membawa film Tilik the Series memperoleh nominasi sebagai Serial Web Terpuji dalam Festival Film Bandung tahun 2023, Siti Fauziah sebagai Bu Tejo juga dinominasikan sebagai Pemeran Utama Wanita Terpuji Serial Web Festival Film Bandung tahun 2023, serta Wahyu Agung Prasetyo dinominasikan sebagai Sutradara Terpuji Serial Web Festival Film Bandung tahun 2023 berdasarkan laman resmi Festival Film Bandung.

Alur cerita dalam Film Tilik the Series ini dimulai dari episode pertama yang menceritakan mengenai usaha Bu Tejo dalam membentuk tim sukses bagi Pak Tejo yang hendak mencalonkan diri menjadi lurah Desa Karangwaru dengan mendekati Bu RT sebagai salah satu pemimpin perempuan yang memiliki pengaruh besar di desanya, namun Bu RT menolak keinginan Bu Tejo karena Bu RT merasa bahwa memerlukan kehati-hatian untuk mendukung salah satu calon pemimpin karena apa yang akan dipilihnya juga akan berdampak pada integritas dirinya sendiri, terlebih Pak Tejo juga memiliki skandal karena dekat dengan penyanyi campursari. Di lain sisi, Pak Hartono sebagai lawan politik Pak Tejo berencana untuk menguatkan strategi kampanye dengan pembagian sembako dan menjadikan Pak Tejo sebagai calon boneka untuk memecah suara Bu Lurah yang memiliki pendukung yang besar.

Episode kedua membahas mengenai kebenaran skandal Pak Tejo dan penyanyi campursari, permasalahan Pak Subari dan rentenir, serta permasalahan tanah kas desa. Bu Tejo yang curiga dengan Pak Tejo mencari kebenaran di mana ia menemukan bahwa penyanyi campursari yang dekat dengan Pak Tejo ternyata merupakan teman masa kecil Bu Tejo dan Pak Tejo tidak melakukan perselingkuhan. Bu Tejo juga membantu Pak Subari dengan berdebat dan memarahi para rentenir yang menagih utang Pak Subari dengan tidak sopan dan mengganggu kenyamanan ibu-ibu yang tengah berkumpul di rumah Bu Subari yang kemudian terdapat Pak Hartono yang tiba-tiba datang untuk melunasi utang Pak Subari.



Gambar 2.6 Voucher Internet yang Dibagikan oleh Pak Hartono kepada Warga

Episode ketiga membahas mengenai Bu Tejo yang menyelidiki permasalahan tanah kas desa, peran Bu Tejo dalam masyarakat, serta politik kotor dan kampanye terselubung yang dilakukan Pak Hartono. Bu Tejo bertanya mengenai permasalahan tanah kas desa kepada Bu Lurah di mana ternyata tanah yang hendak dijual Pak Tejo merupakan tanah di seberang desa milik Mbah Sastro, bukan tanah kas desa. Kedatangan Bu Tejo untuk menanyakan hal tersebut kepada bu lurah menjadikan Pak Tejo marah karena merasa dirinya tidak perlu dibela oleh Bu Tejo, namun Bu Tejo sebagai tim sukses merasa harus mengerti dan membela Pak Tejo untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, peran Bu Tejo dalam masyarakat ini diketahui oleh bu lurah saat melakukan inspeksi pasar di mana para

warga menceritakan bahwa Bu Tejo suka meminjamkan uang untuk orang lain tanpa menagihnya dan membangun atap di pasar untuk orang-orang yang sedang menunggu orang lain berbelanja. Adapun Pak Hartono melakukan politik kotor kampanye terselubung dengan membagikan *voucher* internet kepada para warga dan memprovokasi Pak Tejo dengan membeli tanah yang hendak dibeli Pak Tejo.

Episode keempat membahas mengenai kesiapan kedua calon lurah Desa Karangwuru di mana Pak Tejo lebih berfokus mengumpulkan dana kampanye dengan cara meminta kembali pinjaman warga yang telah diberikan Bu Tejo sebelumnya dengan berbagai alasan, seperti membayar sekolah atau biaya berobat anaknya untuk mengalahkan Pak Hartono, sedangkan Pak Hartono berfokus pada memprovokasi Pak Tejo dengan melunasi tanah yang hendak dibeli Pak Tejo dan mengumpulkan dukungan warga dengan mendekati pemuda desa untuk membantu membagikan Alat Peraga Kampanye (APK). Pak Tejo yang terprovokasi kemudian memarahi Bu Tejo karena merasa bahwa Bu Tejo harus tunduk dan mengurus semua kebutuhan Pak Tejo sebagai isteri, namun Bu Tejo dirasa tidak melakukan apa-apa untuk dirinya. Kemudian, ketika Bu Tejo memarahi tukang parkir yang memberlakukan tarif tidak normal, Bu Tejo bertemu dengan Bu Subari sehingga Bu Tejo mengetahui tindakan Pak Tejo yang menagih utang kepada para warga. Hal tersebut memicu pertengkaran antara Pak Tejo dan Bu Tejo yang

mengakibatkan Pak Tejo kabur dari rumah dan Bu Tejo yang maju untuk mencalonkan diri menjadi lurah sesuai dengan arahan bu lurah sebelumnya.



Gambar 2.7 Bu Tejo melakukan kampanye di pasar

Episode kelima membahas mengenai kampanye yang dilakukan oleh dua calon lurah Desa Karangwaru. Pak Hartono melakukan kampanye dengan membagikan sembako dan mengganggu kegiatan kampanye Bu Tejo dengan mendatangi pasar tempat Bu Tejo berkampanye menggunakan pengeras suara, mengundang penyanyi dangdut untuk mengalihkan perhatian warga kepada dirinya, dan menyebarkan informasi bahwa Bu Tejo menjanda karena ditinggal oleh suaminya, sedangkan Bu Tejo berfokus pada sosialisasi gizi seimbang di posyandu dan program stasiun sampah untuk kegiatan daur ulang dan produksi kerajinan, serta sosialisasi mengenai program pemberdayaan UMKM desa yang diprakasai oleh ibu-ibu di Desa Karangwaru.

Episode keenam mengenai kampanye kotor yang dilakukan oleh Pak Hartono dan kegiatan pasar kreatif yang dilakukan oleh Bu Tejo. Pak Hartono mengundang Pak Tejo untuk menjadi pembicara dalam kegiatan doa bersama yang disusupi dengan kampanye terselubung yang diadakannya. Pak Hartono dalam pidatonya merendahkan pemimpin perempuan karena menjadikan pembangunan desa terlalu lambat karena lurah perempuan yang sakit-sakitan. Perempuan juga dianggap sebagai pemimpin yang hanya bisa mengumbar janji tanpa bukti. Pak Hartono menganggap Desa Karangwaru memerlukan pemimpin laki-laki yang

lebih kuat dan tegas. Setelah acara selesai, Pak Hartono membagikan sembako gratis dan amplop berisi uang di dalamnya. Kegiatan Pak Hartono tersebut diketahui oleh petugas Bawaslu, namun masalah tersebut diselesaikan dengan Pak Hartono yang memberikan suap kepada para petugas. Selain itu, Pak Hartono juga mempersiapkan dua macam amplop yang berisikan uang dan stiker Bu Tejo, serta amplop dengan stiker foto diri Pak Hartono. Sementara itu, Bu Tejo memilih untuk melakukan kampanye bersih dengan melakukan kegiatan Pasar Kreatif yang diikuti berbagai UMKM dan para warga desa dengan antusias yang kemudian diganggu oleh keberadaan Nopek dan para pemuda desa lainnya sebagai tim sukses Pak Hartono yang menghentikan kegiatan tersebut dan menyebut Bu Tejo sebagai seorang janda yang kemudian membuat Bu Tejo marah dan menampar pipi Nopek. Kemudian, kegiatan kampanye Bu Tejo yang padat membuat anak laki-lakinya marah dan tidak pulang ke rumah karena merasa tidak ada yang memperhatikannya lagi.

Episode ketujuh membahas mengenai hari pemilihan lurah Desa Karangwaru. Pak Hartono berfokus kepada pembagian amplop uang di waktu subuh atau yang dikenal dengan serangan fajar dan mempersiapkan acara kemenangannya. Kegiatan Pak Hartono mengisikan amplop dengan stiker Bu Tejo diketahui oleh para warga karena adanya bukti video yang tersebar, namun warga masih juga berasumsi keduanya sama-sama menggunakan *money politics*. Kemudian, Pak Tejo bertemu Pak Hartono di TPS di mana Pak Hartono mengetahui bahwa Pak Tejo diam-diam mendukung Bu Tejo. Dalam masa penghitungan suara, Pak Hartono mempersiapkan acara kemenangannya, sedangkan Bu Tejo bersama

tim suksesnya berkumpul di rumah Bu Tejo untuk menunggu hasil penghitungan suara.

Episode kedelapan membahas mengenai kemenangan Bu Tejo dan kekalahan Pak Hartono. Bu Tejo unggul dengan 27 suara yang menjadikan Bu Tejo sebagai lurah Desa Karangwuru. Dalam hal ini, Bu Tejo digambarkan sebagai seseorang yang mengetahui potensi orang lain dengan menjadikan Bu Subari sebagai direktur Bumdes dan memiliki perhatian terhadap warganya dengan mempersiapkan bis agar para ibu-ibu yang menjenguk mantan bu lurah tidak lagi menggunakan truk sebagai kendaraan yang berbahaya. Di lain sisi, Pak Hartono harus berhadapan dengan Pak Minto sebagai donaturnya yang meminta pertanggung jawaban.

Alur cerita tersebut menunjukkan bahwa untuk mengikuti kontestasi politik di tengah masyarakat dengan budaya patriarki, Bu Tejo sebagai calon pemimpin perempuan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti konflik peran, stereotip, hingga maskulinitas politik. Namun, berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh perempuan yang berpartisipasi dalam politik ini diperlihatkan dalam film *Tilik the Series* dapat terselesaikan dengan keterampilan perempuan dalam menjalankan kegiatan politik tanpa menghilangkan sisi feminitas perempuan. Perempuan diperlihatkan menggunakan strategi berpolitik yang sehat dengan mengutamakan pemberdayaan perempuan, lebih mementingkan komunikasi untuk mensosialisasikan program kerjanya, dan tidak berfokus pada *money politics* seperti yang dilakukan oleh lawan politiknya.